

Dualism in China's Strategic Culture Implementation Through 'Confucian-Pacifism' and 'Cultural Realism' in Tackling Border Problems

Dualisme Implementasi Budaya Strategis Tiongkok melalui 'Confucian-Pacifism' dan 'Cultural Realism' dalam Menangani Isu Perbatasan Wilayah

Cecilia Aldora

Universitas Airlangga

Abstrak:

Tulisan ini mengeksplorasi dualisme Budaya Strategis yang dimiliki Tiongkok berdasarkan responsnya terhadap sengketa teritorial dengan negara Jepang, India, dan Taiwan. Berbeda dengan anggapan bahwa suatu negara hanya memiliki satu budaya strategis, penelitian ini menunjukkan bahwa Tiongkok secara bersamaan menerapkan dua budaya strategis, yang hampir bertentangan satu sama lain: Confucian-Pacifism dan Cultural Realism. Confucian-Pacifism berorientasi pada dialog dan harmoni, dan Cultural Realism mengedepankan pragmatisme yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan. Dualisme yang diciptakan oleh kedua budaya strategis ini harus ditelusuri lebih lanjut guna sungguh memahami dimensi multi-aspek pendekatan Tiongkok dalam hubungan internasional dan terutama dalam konflik perbatasan. Tulisan ini membahas bagaimana kedua budaya strategis ini tidak saling berkompetisi namun berjalan beriringan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang mempengaruhi perilaku Tiongkok di panggung global, terutama dalam menanggapi sengketa teritorial dengan negara-negara tetangganya.

Kata-Kata Kunci: budaya strategis, Tiongkok, dualisme, sengketa teritori

Abstract:

This paper explores the dualism in China's Strategic Culture based on its responses to territorial disputes with countries like Japan, India, and Taiwan. Unlike just one strategic culture for a state, this research demonstrates that China simultaneously enacts two distinct, almost contradicting in a way of strategic cultures: Confucian Pacifism and Cultural Realism. Whereas Confucian Pacifism is dialogical and harmony-oriented, Cultural Realism carries the act of pragmatism entailing threats or use of force. Dualism created by these two strategic cultures is what one needs to recognize in order to really appreciate the multi-dimensional with which China has treated international relations and border conflict. This paper discusses how these two strategic cultures not compete with each other but work hand in hand to influence the decision-making in influencing China's behavior on the global stage, especially in response to territorial disputes with its neighboring countries.

Keywords: strategic culture, China, dualism, territorial disputes

Korespodensi:

Cecilia Aldora (cecilia.aldora-2021@fisip.unair.ac.id)

Pendahuluan

Ketika pembahasan berputar seiring politik internasional dan aktor-aktor utama yang mendominasi panggungnya, maka Tiongkok merupakan salah satu negara yang diakui sebagai pemeran utama. Sebab, Tiongkok di bawah pimpinan Xi Jinping merupakan salah satu negara yang memicu antara kekaguman maupun keresahan dari negara-negara lain. Salah satu alasan yang paling nampak ialah bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dan bagaimana cara ia berperilaku dengan isu-isu yang melanda negaranya ditangani secara tegas (Sutter 2021). Namun, dengan kuatnya Tiongkok di tatanan internasional saat ini, bukan berarti Tiongkok merupakan negara yang bebas dari isu-isu yang sungguh menekan.

Isu keamanan telah menjadi suatu masalah yang besar dalam perpolitikan dan keamanan Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang besar dan berbatasan langsung dengan beberapa negara-negara lainnya, Tiongkok sudah tidak asing dengan permasalahan perbatasan di dalam sejarahnya yang berlanjut hingga masa kini. Dimulai dari Himalaya hingga di lautan sekitar Tiongkok, sengketa wilayah hadir menemani dinamika relasi Tiongkok dengan negara-negara seperti India, Jepang, dan Taiwan, memberikan tensi yang cukup panjang, menghambat kerja sama yang damai dan terus meningkatkan potensi intervensi militer di daerah-daerah tertentu (Krishnanputty 2020).

Uniknya, dalam menangani masalah-masalah perbatasan ini, Tiongkok memiliki suatu pola yang membedakannya dengan beberapa negara lain. Memang, Tiongkok seperti negara lain banyak menggunakan *use of threats* (ancaman) dan juga pengendalian perbatasan melalui pengamatan militer (Jebb, 2023). Namun, Tiongkok memiliki sisi yang lain dalam menangani isu tersebut. Dia tidak hanya bergantung pada satu cara keluar-kekerasan-namun ia memiliki pendekatan lain, yang lebih sesuai dengan perdamaian (Nathan dan Scobell 2012). Ini membuktikan bahwasanya Tiongkok memiliki perpaduan antara realisme dalam penggunaan kekerasan dan pasifisme dalam pendekatan yang damai dengan negara lain dalam menyelesaikan isu keamanan dan perbatasannya.

Ini merupakan apa yang disebut sebagai dualisme budaya strategis yang dimiliki oleh Tiongkok. Oleh sebab itu, terdapat suatu anomali di sini yang mana acap kali suatu negara memiliki hanya satu budaya strategis yang mendefinisikan semua perilaku negaranya, atau memiliki banyak budaya

strategis namun penggunaannya bergantian atau salah satu saja dalam satu isu. Sedangkan, kenyataannya pada negara Tiongkok ialah dia dapat menggunakan kedua pendekatan yang bertentangan tersebut (kekerasan dan perdamaian) secara beriringan satu sama lain (Jebb 2023). Dualisme budaya strategis yang dimiliki oleh Tiongkok ini menghadirkan diskusi baru yakni bagaimana kedua budaya strategis ini dapat bermain beriringan dan tidak menghambat (cancel out) satu sama lain.

Dualisme yang dimiliki oleh Tiongkok ini merupakan hal yang unik dalam kajian Hubungan Internasional dikarenakan sering kali meskipun suatu negara memiliki lebih dari satu budaya strategis, pada situasi tertentu, hanya akan ada satu budaya strategis yang akan ditemukan pengaruhnya dalam suatu kebijakan luar negeri atau militer. Di dalam analisis 'Strategic Culture and Small States: The Case of Finland', tertulis bahwa ada kemungkinan suatu negara untuk memiliki beberapa bentuk budaya strategis yang terkadang saling bersaing. Sehingga, pada situasi tertentu atau di isu-isu spesifik, akan ada satu atau dua budaya strategis yang mendominasi dibandingkan dengan budaya strategis lainnya yang dimiliki oleh negara tersebut (Gärtner, 2008).

Akan tetapi, dengan adanya dualisme budaya strategis yang tidak saling berebut dominasi namun hadir secara koeksistensi dalam membawakan pengaruh dalam kebijakan luar negeri Tiongkok ini secara tidak langsung telah menantang temuan-temuan atau argumentasi terdahulu mengenai cara kerja budaya strategis. Dengan ini, penulis melalui analisis ini akan menuliskan terkait budaya strategis Tiongkok, dengan spesifikasi implementasi budaya strategis 'Confucian Pacificism' dan 'Cultural Realism' yang berjalan bersamaan pada penanganan problematika isu-isu keamanan dalam bidang perbatasan wilayah Tiongkok, sesuai dengan definisi yang disediakan oleh Alan Bloomfield. Argumen utama penulis adalah Tiongkok dapat menyeimbangkan keduanya karena Tiongkok memiliki visi untuk menciptakan *harmony* di dunia ini namun dengan Tiongkok sebagai center dari dunia tersebut yang dijalankan melalui cara-cara yang pragmatik, memunculkan suatu dualisme dalam pengaruh budaya strategis di belakang penerapan kebijakan-kebijakannya terkait sengketa wilayah yang terjadi dengan Taiwan, India, dan Jepang.

Budaya Strategis

Di dalam studi Hubungan Internasional, sudah tersedia banyak teori yang memiliki kegunaan sebagai kaca mata yang digunakan untuk memahami berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Namun, anehnya, tidak ada teori-teori yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan perbedaan perilaku dan pendekatan yang digunakan oleh negara-negara pada isu-isu yang sama atau mirip. Teori besar Hubungan Internasional seperti realisme yang sering digunakan dalam pembahasan *power* dan kepentingan nasional, memiliki batasan dalam menjelaskan sepenuhnya terkait hal ini. Teori Hubungan Internasional yang sudah ada sebelumnya kurang mampu dalam bagaimana ia dapat membantu kita dalam menganalisis reaksi-reaksi negara yang berbeda dan beragam terhadap ancaman atau peluang serupa, seperti perang atau isu perbatasan wilayah (Lock 2017).

Di sini lah eksistensi dari budaya strategis berperan. Tokoh yang penting untuk diingat untuk lahirnya studi budaya strategis adalah Jack Lewis Snyder, seorang politikus dan peneliti asal Amerika Serikat yang menyuarakan ketidakpuasannya terhadap teori Hubungan Internasional pada masa Perang Dingin. Analisisnya dengan judul 'The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations' (1977) membuka pertanyaan terkait alasan di balik perbedaan perilaku dan pendekatan strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama masa *Cold War* (Perang Dingin). Penelitian yang dilakukan oleh Snyder muncul berangkat dari ketidakpuasan ketidakmampuan teori realisme tersebut dalam menjelaskan fenomena ini, sehingga ia melakukan analisis pendekatan strategis kedua negara tersebut agar dapat menjelaskan mengapa berbagai negara, meskipun menghadapi dilema keamanan yang serupa, sering kali memilih jalur strategis yang berbeda.

Satu kritik utama yang perlu untuk digaris bawahi di sini adalah kritik yang diutarakan Snyder pada tulisan yang sama, yang mana ia menentang pemikiran bahwasanya aktor hanya akan bersikap rasional, dikendarai oleh cost and benefits. Sedangkan, ada satu aspek yang sering kali dilupakan yang menjadi alasan utama mengapa teori-teori terdahulu Hubungan Internasional seperti realisme. Satu aspek ini adalah faktor-faktor kultural suatu negara (Snyder, 1977). Sehingga, Snyder memperkenalkan suatu istilah budaya strategis yang ia definisikan sebagai sekumpulan ide-ide, respons emosional yang terkondisi (*conditioned emotional responses*), beserta dengan pola perilaku–*habitual behaviours*–yang diperoleh oleh komunitas strategis nasional melalui instruksi atau peniruan dan berbagi satu sama lain sehubungan dengan strategi nuklir.

Namun, masih banyak kritik yang datang terhadap pengertian akan budaya strategis milik Snyder. Akan tetapi, ada hal yang menguntungkan datang dari banyaknya tuaian kritik yang diarahkan terhadap analisis budaya strategis milik Jack Snyder. Hal itu ialah banyaknya alternatif pemahaman budaya strategis yang lahir akibat kritik-kritik tersebut. Dua kritikus utama yang muncul berdekatan dengan Snyder adalah Colin Gray dan Alastair Johnston. Gray melalui tulisannya 'Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back' (1999), menuliskan ketidakpuasannya terhadap pengertian budaya strategis yang disediakan oleh Snyder. Gray menyayangkan adanya kekurangan dalam pengujian empiris yang dibutuhkan untuk pemahaman suatu cara negara berperilaku.

Gray menekankan pentingnya analisis komparatif budaya strategis di berbagai negara, tidak hanya berkuat pada satu definisi saja dan menggunakannya di semua negara. Dengan memeriksa bagaimana berbagai budaya menafsirkan dan merespons tantangan strategis yang serupa, analisis yang dihasilkan dapat memprediksi perilaku dengan lebih baik, sesuai dengan apa yang ia tuliskan dalam analisisnya 'Modern Strategy' (1999). Sama dengan Gray, Alastair Johnston juga menuaikan kritiknya terhadap keterbatasan pemahaman budaya strategis yang disediakan oleh Jack Snyder. Johnston melalui 'Thinking about Strategic Culture' (1995) berargumen bahwasanya konseptualisasi budaya strategis milik Snyder terlalu statis dan deterministik, yang mana telah menjadi restriksi dari konsep budaya strategis, bukan malah mengembangkannya.

Meskipun Gray dan Johnston sudah memunculkan penemuan-penemuan baru dalam tinjauan budaya strategis, masih ada pendekatan yang lahir lagi setelahnya dari kekurangan keduanya. Lahirlah di sini pendekatan yang lebih kontemporer. Andrew Bloomfield menyediakan cara pandang alternatif terhadap budaya strategis yang mana ia memiliki argumentasi utama bahwasanya budaya strategis tidak statis dan kaku melainkan *fluid* (fleksibel) dan adaptif. Hal ini disebabkan oleh budaya strategis yang sesungguhnya dipengaruhi oleh kedua aspek dalam negara, yaitu nilai-nilai budaya dan pertimbangan pragmatis (Bloomfield 2012). Perspektif baru yang diberikan oleh Bloomfield menantang pandangan deterministik dari generasi awal pemahaman budaya strategis. Di sini ia menekankan sifat dinamis dari perilaku strategis. Bloomfield berpendapat bahwasanya budaya strategis akan terus berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan kondisi geopolitik, kemajuan teknologi, dan pergantian kepemimpinan.

Menurut Bloomfield (2012), budaya strategis merupakan suatu konsep yang sangat dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yang kompleks, termasuk konteks historis, kerangka kelembagaan dan pemerintahan, beserta juga dengan norma-norma masyarakat yang ada. Pendekatan holistik ini menjadi pendekatan yang menjelaskan variabilitas dan kemampuan beradaptasi budaya strategis di berbagai negara. Meskipun mengakui pengaruh nilai-nilai budaya terhadap perilaku strategis, Bloomfield juga menekankan bahwa nilai-nilai ini tidak bersifat deterministik, melainkan membentuk preferensi dan pilihan strategis suatu negara dalam konteks pertimbangan pragmatis yang lebih luas (Sato 2014). Ini membuat Bloomfield menjadi tokoh yang menawarkan arti budaya strategis yang lebih luas dan implementatif.

Pandangan Bloomfield mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan suatu negara, yang menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus dan pasti akan mempertimbangkan landasan budaya dan realitas pragmatis ketika menilai perilaku negara dan menyusun strategi diplomatik dan militer. Oleh sebab itu, sejak saat ini, ketika penulis memberikan penjabaran terkait budaya strategis, penulis akan merujuk pada definisi dan pemahaman budaya strategis yang sesuai dengan pemahaman Bloomfield, yaitu sekelompok nilai-nilai dan pemahaman yang dimiliki oleh suatu negara yang berevolusi secara dinamis dan dibentuk oleh interaksi antara nilai-nilai budaya dan pertimbangan pragmatis dalam perilaku bernegara.

Confucian-Pacifism dan Cultural Realism sebagai Budaya Strategis Tiongkok

Apakah Tiongkok memiliki budaya strategis? Tentu saja Tiongkok memilikinya. Justru, Tiongkok merupakan negara yang cukup unik dalam kajian budaya strategis, karena Tiongkok memiliki dua budaya strategis yang hadir secara bersamaan dan acap kali dimainkan secara berdampingan (Jebb 2023). Tiongkok memiliki dua budaya strategis, yang mana penulis akan gunakan seterusnya di dalam tulisan ini, yaitu Confucian Pacifism dan Cultural Realism. Keduanya merupakan budaya strategis yang cukup berbeda satu sama lain, akan tetapi mereka berdua berjalan beriringan dan bersifat fleksibel dalam penerapannya sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Bloomfield (2012) sebelumnya.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait kedua budaya strategis tersebut, ada pentingnya penulis membahas terlebih dahulu terkait konteks kultural

historis yang dimiliki oleh Tiongkok sebagai suatu negara yang mana telah menyusun asal usul dari budaya strategis yang dimiliki oleh Tiongkok itu sendiri. Hal yang paling mendasar mengenai budaya strategis Tiongkok yang dualistik adalah bagaimana Tiongkok memandang dirinya sebagai pusat dari dunia. Kepercayaan ini sudah berangkat dari masa Dinasti Zhou (1046-256 SM) yang mana pada kekaisarannya, Tiongkok menggunakan istilah 'Zhong Guo' untuk menyebut dirinya sendiri (Zhao 2010). 'Zhong' memiliki arti sebagai *center* atau pusat dan 'Guo' dengan arti sebagai *country* atau negara. Sehingga, 'Zhong Guo' memiliki arti sebagai negara pusat dari negara-negara lain (China Global Television Network 2018).

Kekaisaran Zhou pada saat itu menggunakan 'Zhong Guo' sebagai landasan utama untuk menjalankan Tiongkok sebagai sebuah dinasti, dan juga dibantu dengan adanya kepercayaan 'Mandate of Heaven' yang mana mendorong kaisar untuk memerintah orang-orang untuk membawa mereka ke keselamatan (Zhao 2010). Bahkan hingga masa-masa dinasti setelahnya yang telah menggantikan Dinasti Zhou, kepercayaan bahwa Tiongkok adalah pusat dari peradaban manusia ini masih terus berlanjut berdiri sebagai landasan utama dalam memerintah. Bahkan, pemikiran ini masih terus berlanjut hingga masa kini, dengan gagasan ini masih sering digunakan oleh Tiongkok di dalam dialog global, dan juga bagaimana Tiongkok masih sering kali menggunakan narasi historis ini sebagai salah satu dasar dari kebijakan luar negerinya (Shambaugh 2005).

Salah satu unsur dari implementasi 'Zhong Guo' adalah dengan adanya konfusianisme. Sejak era Dinasti Han (206 SM – 220 M), Tiongkok mengadopsi konfusianisme sebagai ideologi dari negaranya pada saat itu, dengan tujuan untuk mempromosikan *moral governance* dan juga kepemimpinan yang didampingi oleh moral yang tinggi dan etika (Hsu, 1999). Dengan adanya konfusianisme sebagai landasan ideologi, akhirnya konfusianisme ini menjadi pembimbing Dinasti Han untuk menjalankan praktik-praktik diplomasi dengan negara-negara lain untuk merealisasikan 'Zhong Guo' tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan Dinasti Han yang membuka 'The Silk Road', salah satu jalur yang paling berkontribusi dalam pertukaran ekonomi, pengetahuan, dan juga kebudayaan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya.

Nilai-nilai yang diajarkan oleh kepercayaan konfusianisme terus menerus mempengaruhi Tiongkok dalam melaksanakan interaksi-interaksi diplomatiknya, yang juga menaruh garibawah dalam melakukan pertukaran

budaya dan seni dengan tujuan untuk memperluas pengaruh Tiongkok, namun juga untuk menjaga relasi-relasi antarnegara yang harmoni dan baik. Khususnya, saat Tiongkok berada di bawah era Dinasti Tang (618-907 M), diplomasi terus dilaksanakan atas nama konfusianisme. Semua pertukaran yang dilakukan oleh Tiongkok dilakukan dengan moral yang tinggi dan juga hormat terhadap satu sama lain (Fairbank & Goldman 1998).

Konfusianisme tersebut secara tidak langsung telah menjadi unsur utama yang berada pada budaya strategis Tiongkok hari ini, yaitu Confucian Pacifism. Di masa sekarang, nilai-nilai konfusianisme dan upaya untuk menjaga perdamaian masih saja menjadi fundamen penting dari *soft power* dari aktivitas diplomatik dan kebijakan luar negeri Tiongkok, dengan Tiongkok terus menerus memastikan bahwasanya dalam berinteraksi di lingkup internasional, harmoni, etika, dan juga hormat kepada satu sama lain antarnegara harus tetap terjaga (Callahan 2016).

Sehingga, dapat dipahami bahwasanya Confucian Pacifism merupakan budaya strategis yang menekankan moral, harmoni, dan perdamaian sebagai prinsip inti dalam berperilaku sehari-hari, termasuk dalam hubungan internasional Tiongkok, yang mencerminkan preferensi historis Tiongkok untuk hidup berdampingan secara damai dan menghindari konflik. Sesuai dengan analisis Johnston (1995), budaya strategis ini benar adanya berakar dari Konfusianisme yang menjadi filosofi kehidupan Tiongkok, yang mana menekankan kepada cara hidup non-agresif sebagai prinsip dasarnya (Zheng 2013). Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok sebagai suatu negara dengan Confucian Pacifism sebagai budayanya memprioritaskan hidup berdampingan secara damai dan menghindari konflik bila memungkinkan dengan negara lain.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, budaya strategis Confucian Pacifism lahir dari konteks sejarah kultural Tiongkok yang mana telah membentuk preferensi Tiongkok terhadap solusi diplomatik di isu-isu tertentu dibandingkan dengan konfrontasi militer. Legasi kultural historis ini yang dimiliki Tiongkok ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pendekatan Tiongkok terhadap hubungan internasional hingga saat ini (Johnston 1995). Cita-cita dari Konfusianisme sendiri adalah kebajikan (*ren*) dan kebenaran (*yi*). Nilai-nilai seperti ini lah yang hingga sekarang telah memandu interaksi Tiongkok dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara tetangganya, dengan penekanan pada rasa saling menghormati dan

penjunjungan tinggi harmoni. Pemikiran Konfusianisme sebagai dasar dari budaya strategis Confucian Pacifism mempengaruhi perilaku etis dan diplomasi Tiongkok sebagai media dan opsi utama untuk menyelesaikan perselisihan, mencerminkan preferensi historis terhadap stabilitas dan pemerintahan yang 'baik hati' (Weiming 2024).

Akan tetapi, perlu diakui bahwasanya Tiongkok tidak terjauhkan dari agresi dari negara lain. Dengan adanya tantangan dari luar, hal ini mendorong Tiongkok untuk memiliki *dual response*, dengan mengasimilasikan pasifisme berlandaskan konfusianisme dengan pemikiran realistik yang kemudian melahirkan budaya strategis Tiongkok lainnya yang acap kali disebut sebagai Cultural Realism. Budaya strategis tersebut juga tidak muncul secara tiba-tiba, dengan Tiongkok pada masa Dinasti Qing (1644-1911) sering kali menemukan situasi di mana ia harus melakukan diplomasi yang damai namun juga selalu siap siaga untuk menggunakan *use of force* atau *use of threats* untuk menjaga keamanan dan kepentingan Tiongkok (Johnston 1995).

Pada masa itu juga, Tiongkok telah mengalami beberapa problematika, salah satunya adalah Opium War. Konflik yang dialami oleh Tiongkok ini telah menunjukkan kelemahan yang dimiliki oleh Dinasti Qing dan juga bagaimana Tiongkok masih lemah jika dibandingkan dengan negara-negara adidaya asing pada saat itu, seperti Inggris (Hsu, 1999). Dengan adanya 'Treaty of Nanking'-hasil kekalahan Tiongkok di konflik tersebut-Tiongkok harus mulai untuk menerima implikasi kekalahan, seperti ketidakadilan *trade agreements* dan juga kekuasaan atas wilayahnya sendiri yang sangat *underwhelming*. Akibat konflik-konflik seperti inilah Tiongkok jadi mulai mengalami kesadaran bahwasanya negara ini harus mulai dijalankan tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip pasifisme namun juga harus memiliki pemikiran baru yang dapat memastikan kepentingan dan keamanan Tiongkok untuk tetap terjaga (Fairbank & Goldman 1998).

Alhasil, Tiongkok mulai menjalankan nilai-nilai Konfusianisme yang dijalankan berbarengan dengan cara-cara yang lebih pragmatik di dalam berhubungan dengan ancaman-ancaman asing, dan juga dalam melaksanakan implementasi dari kebijakan luar negerinya dengan negara lain. Lahirlah Cultural Realism, budaya strategis yang mencerminkan pendekatan yang lebih pragmatis dari negara Tiongkok terhadap keamanan dan kedaulatan yang dimilikinya (Johnston 1995). Melalui tulisan 'Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History' oleh Johnston (1995), ia menjelaskan

bahwasanya Cultural Realism menjadi fundamen dari aksi-aksi tegas Tiongkok apabila diperlukan untuk melindungi kepentingannya atau national interests. Cultural Realism dalam budaya strategis Tiongkok sangat berbeda dengan Confucian Pacifism yang idealis, Cultural Realism justru mencerminkan pendekatan yang sangat pragmatis terhadap keamanan nasional Tiongkok.

Sesuai dengan argumentasi utama dari penulis, perlu diingat bahwasanya Tiongkok memandang dirinya sendiri sebagai pusat peradaban – sesuai dengan namanya yakni ‘Zhong Guo’–dengan konteks sejarah yang panjang yang menginginkan suatu dominasi regional. Kepercayaan ini juga dipengaruhi oleh konsep ‘tianxia’, atau ‘all under heaven’ di mana Tiongkok memiliki pemahaman bahwasanya Tiongkok memiliki dan diberikan posisi yang tepat sebagai kekuatan utama di kawasanya yang bisa menjadi permulaan dari pusat peradaban dunia (Wang 2017). Konsep lain seperti ‘Zili gengsheng’ juga menjadi dasaran Tiongkok dalam menyoroti pentingnya otonomi nasional dan kemandirian, terlepas dari kekuatan eksternal. Histori mereka akan invasi asing di masa lalu memicu rasa kerentanan yang kuat untuk mencegah penaklukan di masa depan (Johnston 1995).

Sejarah dan nilai-nilai itulah yang menjadi susunan dasar dari budaya strategis Cultural Realism. Melalui analisis konteks kontemporer, Cultural Realism sebagai budaya strategis Tiongkok acap kali terwujud dalam sikap tegas dan agresif yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap sengketa wilayah dan upaya modernisasi militernya. Budaya strategis pragmatis dan realis milik Tiongkok ini menggarisbawahi kesiapan dan kekuatan Tiongkok untuk melindungi kedaulatannya dan memperluas pengaruhnya di kawasan, sesuai dengan penjelasan aksi-aksinya dalam menanggapi isu persengketaan wilayah di masa sekarang.

Menurut Johnston (1995), Tiongkok menyeimbangkan kedua budaya strategisnya yaitu Confucian Pacifism dan Cultural Realism dengan mengintegrasikan strategi diplomatik dan pencapaian dunia harmonis dengan sikap dan kebijakan yang tegas dalam menjaga kepentingan nasional Tiongkok. Pendekatan dualistik ini memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan elemen kooperatif dan kompetitif dalam keterlibatan internasionalnya. Dualisme dalam budaya strategis Tiongkok mencerminkan kesinambungan historis Tiongkok dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya yang diseimbangkan dengan kebutuhan dan respons pragmatis akibat adanya tekanan eksternal.

Konsep budaya strategis yang disajikan oleh Bloomfield (2012) mengenai budaya strategis sebagai serangkaian nilai dan perilaku negara yang dinamis dan adaptif membantu menjelaskan bagaimana Tiongkok menavigasi antara kedua budaya strategis yang dimilikinya itu. Dualisme ini mencerminkan kemampuan Tiongkok untuk menyesuaikan perilaku strategisnya sambil menjaga kesinambungan fondasi budaya dan historisnya.

Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Johnston (1995) sebelumnya, dengan sejarah panjang yang dimiliki oleh Tiongkok terkait siklus dinasti dan interaksinya dengan negara-negara tetangga telah membentuk pendekatan Tiongkok terhadap keamanan dan diplomasi internasional. Bloomfield di sini memberikan penegasan lagi pada budaya strategis sebagai produk dari pengalaman historis dan sekelompok nilai-nilai budaya yang menggarisbawahi pentingnya kesinambungan dan adaptasi dalam perilaku strategis Tiongkok dengan negara-negara lain, termasuk dalam isu perbatasan wilayah. Hal ini menjelaskan dualisme yang dimiliki oleh Tiongkok bagaimana ia hendak menciptakan dunia yang dijalankan dengan harmoni namun juga ia harus memastikan dengan jalan pragmatis bahwa ia harus tetap menjadi tengah peradaban dan memastikan kepentingan nasionalnya terpenuhi dan terlindungi untuk mencapai tujuan itu.

Maka dari itu, respons kebijakan yang efektif harus menyeimbangkan keduanya, Confucian Pacifism dan juga Cultural Realism (Ratner 2014). Diplomasi multilateral dan dialog strategis sangat lah signifikan bagi Tiongkok untuk mengelola ketegangan antar wilayah (terutama dengan negara-negara tetangga) dan meningkatkan kerja sama yang baik dalam isu-isu global seperti isu perbatasan dan kedaulatan wilayah. Konsep budaya strategis yang disajikan oleh Bloomfield (2012) mendorong para pembuat kebijakan untuk juga mempertimbangkan landasan budaya dan realitas pragmatis dalam memahami perilaku Tiongkok. Pendekatan ini membantu mengantisipasi peran Tiongkok di masa depan dalam urusan global dan potensi konflik atau kerja sama, termasuk problematika isu perbatasan wilayah dengan negara tetangga.

Dualisme Budaya Strategis Tiongkok dalam Penanganan Isu Perbatasan Wilayah

Dualisme merujuk kepada koeksistensi dari dua prinsip atau elemen yang saling kontradiktif yang mampu berinteraksi dan melengkapi satu sama lain di dalam satu sistem yang sama (Hofstede 2001). Sehingga di dalam kajian

budaya strategis, ketika terdapat dua budaya strategis di dalam satu negara yang sifatnya saling bertentangan namun dalam praktiknya dapat berjalan beriringan dengan saling melengkapi satu sama lain, hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu dualisme dari budaya strategis.

Dalam konteks pembahasan Tiongkok, dualisme dapat diartikan kepada koeksistensi dari dua budaya strategis yang fungsinya sangat bertentangan yaitu Confucian Pacifism yang fokus pada pasifisme atas dasar nilai-nilai konfusiansime dan juga Cultural Realism yang mana merupakan realisme atau pragmatisme. Dualisme yang dimiliki oleh budaya strategis Tiongkok ini menunjukkan bagaimana Tiongkok di masa kini menavigasi lingkup geopolitik yang kompleks yang mana mendorong Tiongkok untuk memanfaatkan kelebihan dari masing-masing budaya strategis yang ada, sehingga kedua budaya strategis tersebut tidak 'mengalahkan' satu sama lain, namun mempengaruhi kebijakan Tiongkok dengan saling melengkapi (Foot 2016).

Kehadiran dualisme Confucian Pacifism dan Cultural Realism di budaya strategis Tiongkok dapat selalu dipahami dengan meninjau balik sejarah yang dimiliki oleh Tiongkok, seperti pada pembahasan sebelumnya. Confucian Pacifism yang menekankan moral, harmoni, dan resolusi diplomatik telah lahir dan terus menerus bertahan di Tiongkok dengan adanya preferensi Tiongkok untuk menjauhi konflik atau perang dengan mengutamakan solusi-solusi dialog yang damai (Johnston 1995). Namun, di sisi yang sama, Tiongkok yang telah mengalami beberapa pengalaman yang memalukan, seperti kekalahan perang dan hilangnya wilayah yang dikuasainya, telah mendorong Tiongkok untuk menyediakan sikap pragmatis yang siap untuk mengendalikan *external threats* (Callahan 2016).

Dualisme ini jika diterapkan dalam isu-isu nyata yang kontemporer di Tiongkok masa ini dapat dilihat dengan bagaimana Tiongkok acap kali berpolitik luar negeri. Strategi dan pendekatan yang digunakan oleh Tiongkok merefleksikan adanya dualisme, yang mana Tiongkok akan menggunakan prinsip pasifis dalam berdialog dengan negara-negara lain namun juga disertai dengan *assertive actions* ketika dibutuhkan dan sebagai pengetahuan kepada negara lain jikalau Tiongkok mampu untuk melindungi negara dan kepentingannya juga (Foot 2016). Hal ini memberikan fleksibilitas kepada Tiongkok dalam menentukan *strategic behaviours* yang bisa ia ambil saat mengalami beberapa isu dengan negara lain, salah satunya adalah dalam sengketa wilayah dengan negara-negara tetangganya.

Dalam menangani isu-isu perbatasan wilayah yang dimiliki, Tiongkok memainkan kedua budaya strategisnya, yaitu Confucian Pacifism dan Cultural Realism (Johnston 1995). Hal ini memungkinkan akibat implementasi dari keduanya saat Tiongkok berperilaku atau bertindak dalam lingkup politik internasional. Tiongkok mampu memanfaatkan fleksibilitas dan dinamika dari kedua budaya strategis dalam menangani permasalahan perbatasan wilayah yang dimilikinya. Oleh sebabnya, setelah ini penulis akan memberikan beberapa kasus-kasus dan isu yang terjadi yang berkaitan dengan isu perbatasan wilayah yang dimiliki oleh Tiongkok dengan Taiwan, India, dan Jepang sebagai contoh.

Pertama, dengan Taiwan. Permasalahan teritorial utama antara Tiongkok dan Taiwan berkisar pada status politik dari Taiwan itu sendiri. Apakah Taiwan suatu negara? Ataukah Taiwan merupakan bagian dari China? Itulah pertanyaan utama yang menjadi fundamen dari perselisihan perbatasan wilayah dari Tiongkok dengan Taiwan (Christensen 2006). Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan prinsip "One Country, Two Systems", yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan bukanlah negara sendiri melainkan bagian darinya. Akan tetapi, Taiwan tetap saja beroperasi di bawah pemerintahannya sendiri dan memiliki sistem politik terpisah, yang secara efektif berfungsi sebagai negara merdeka, bukan sebagai bagian dari Tiongkok.

Tiongkok bersikeras bahwa sesungguhnya Taiwan merupakan salah satu dari provinsi Tiongkok dan pada akhirnya harus bersatu kembali dengan Tiongkok daratan, bukan malah menganggap 'provinsi' tersebut sebagai daratan untuk negara mereka sendiri. Pendirian 'One Country, Two Systems' ini merupakan bagian inti dari bagaimana Tiongkok mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas wilayah Tiongkok (juga ekspansi wilayah). Taiwan memandang dirinya sebagai entitas yang terpisah dan berdaulat dengan pemerintahan, militer, dan kebijakan luar negerinya yang dipilih secara demokratis. Perusahaan ini beroperasi dengan nama resmi 'Republic of China' (Medeiros 2005).

Dengan pendirian 'One Country, Two Systems', Tiongkok mendorong Taiwan untuk hidup berdampingan secara damai dan untuk melakukan integrasi secara bertahap yang harmonis, kerangka pemikiran Tiongkok ini berupaya mencapai stabilitas jangka panjang di kawasanya. Pendekatan ini selaras dengan cita-cita pemerintahan Tiongkok yang didasarkan oleh budaya strategis Confucianism Pacifism yang mengutamakan keharmonisan sosial dan

pembangunan bertahap yang 'baik' dan 'bijak' (Johnston 1995). Namun Taiwan menolak gagasan tersebut karena ingin menjadikan negaranya sebagai negara yang terpisah dari Tiongkok.

Taiwan juga sadar akan dualisme yang dimiliki oleh Tiongkok. Mengapa? Karena meskipun Tiongkok menganjurkan reunifikasi wilayah secara damai, Cultural Realism mendorong upaya modernisasi militer Tiongkok dan perencanaan darurat untuk Taiwan, mempersiapkan skenario potensial jika aksi diplomasi yang damai itu gagal. Pendekatan dualistik terhadap Taiwan menggabungkan retorika damai dengan kesiapan militer, yang menunjukkan komitmen Tiongkok terhadap reunifikasi sekaligus menghalangi campur tangan eksternal, agar memastikan Taiwan tetap tunduk terhadap Tiongkok dan menjadi bagian dari Tiongkok.

Kedua, isu wilayah yang dimiliki Tiongkok dengan India. Di dalam hubungan yang dijalin oleh Tiongkok dan India ini juga menampakkan dualisme budaya strategis dari Tiongkok. Confucian Pacifism mempengaruhi pendekatan Tiongkok terhadap masalah perbatasan dengan India, dua di antaranya yang penting adalah isu perbatasan di wilayah sengketa Aksai Chin dan Arunachal Pradesh. Di sini, Tiongkok menerapkan Confucian Pacifism dengan menekankan dialog dan hidup berdampingan secara damai. Realisme Budaya mempengaruhi pembangunan infrastruktur perbatasan Tiongkok dan penempatan pasukan di wilayah sengketa di sepanjang Garis Kendali Aktual (LAC), yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan strategis (Sato 2014)

Namun, jalur dialog bukanlah satu-satunya media yang digunakan oleh Tiongkok untuk menangani isu ini, karena ada jalan lain juga yang sekaligus diterapkan oleh Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok juga menangani sengketa perbatasan dengan India tersebut dengan modernisasi militer yang disiapkannya di daerah Aksai Chin dan sekitarnya agar jika diperlukan, Tiongkok akan dapat mengendalikan situasi (Tellis 2012). Hal ini dilakukan Tiongkok untuk memastikan bahwa meskipun hubungan keduanya damai untuk saat ini, namun Tiongkok akan tetap memastikan bahwa kepentingan nasionalnya dalam mempertahankan wilayahnya tetap jalan.

Terakhir, dengan Jepang. Isu yang dimiliki Tiongkok dengan Jepang juga menggaris bawahi peranan dualistik budaya strategis yang dimiliki oleh Tiongkok. Pendekatan Tiongkok terhadap sengketa wilayah dengan Jepang mengenai pulau-pulau di Laut Cina Timur (East China Sea), seperti Kepulauan Senkaku/Diaoyu, telah mencerminkan kehadiran budaya strategis Confucian

Pacifism pada solusi diplomatik dan non-agresi yang dilakukan oleh Tiongkok (Fravel 2010). Tiongkok aktif dalam berpartisipasi dalam forum multilateral dan mekanisme regional seperti KTT Asia Timur dan Forum Regional ASEAN untuk membahas dan menangani sengketa wilayah antara Tiongkok dan Jepang, yang sekali lagi telah sukses dalam mencerminkan cita-cita Konfusianisme terkait keharmonisan dan kerja sama yang damai.

Tiongkok secara konsisten turut serta aktif dalam menginisiasikan pembicaraan bilateral dengan Jepang untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu tersebut. Cara penanganan isu ini menggarisbawahi preferensi Confucian Pacifism Tiongkok untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi dibandingkan dengan media lain, yakni melalui operasi agresi militer (Shirk 2007). Meskipun ketegangan antara Tiongkok dan Jepang terus saja meningkat, Tiongkok acap kali berusaha untuk menghindari konfrontasi militer langsung terkait Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Sebaliknya, mereka menggunakan kapal penjaga pantai dan kapal sipil untuk menegaskan klaimnya, sehingga meminimalkan risiko eskalasi menjadi konflik skala penuh.

Namun, bukan berarti sekali lagi Tiongkok hanya menyediakan tindakan damai saja. Hadir lagi di sini Cultural Realism yang selalu saja mendampingi jalannya Confucian Pacifism. Di isu ini, tetap Cultural Realism terwujud dalam tindakan Tiongkok yang cukup tegas, termasuk dalam memastikan berjalannya patroli maritim dan peningkatan pelatihan militer di dekat pulau-pulau yang disengketakan dengan Jepang tersebut, yang mana hal ini sesungguhnya menunjukkan adanya pendekatan pragmatis Tiongkok dalam menjaga kedaulatan. Tiongkok menyeimbangkan ajakan dialog yang sesuai dengan prinsip Confucian Pacifism untuk melakukan diplomasi dengan adanya ketegasan militer sebagai media lanjutannya, dilandasi oleh budaya strategis Cultural Realism.

Perlu diingat, sesuai dengan analisis yang disuguhkan oleh Shambaugh (2013), pemimpin Tiongkok dari tahun ke tahun, dinasti hingga saat ini, selalu memiliki preferensi yang kuat untuk merekognisi bahwa pasifisme dan pemikiran yang realistis sama-sama penting dalam mempertahankan Tiongkok di tatanan global, namun di saat yang bersamaan untuk terus memperluas *influence* yang ia miliki. Fleksibilitas yang Tiongkok miliki dalam budaya strategis yang mempengaruhi langkah-langkah kebijakan luar negerinya, khususnya dalam menangani isu-isu wilayah, telah mewujudkan *image* bahwasanya Tiongkok merupakan negara yang mampu untuk berkooperasi dan

bekerja sama dengan baik, namun juga Tiongkok dalam aksinya dapat memastikan bahwasanya wilayah dan keamanannya tetap terjaga melalui perkembangan keamanannya.

Eksistensi dari sejarah panjang yang dimiliki oleh Tiongkok menjadi faktor utama mengapa Tiongkok memiliki dualisme budaya strategis dalam menangani permasalahan teritorial dengan beberapa negara-negara tetangga Tiongkok, seperti Taiwan, India, dan Jepang. Sehingga hal ini telah memengaruhi respons Tiongkok terhadap tantangan perbatasan wilayah kontemporer yang dihadapi olehnya. Kunci utama yang dipegang oleh budaya strategis Tiongkok sangat sesuai dengan Bloomfield (2012) di mana dualisme budaya strategis Tiongkok ini menggambarkan adaptasi yang fleksibel dan dinamis sebagai respons terhadap dinamika geopolitik yang terus berkembang. Dualisme Confucian Pacifism dan Cultural Realism ini menggarisbawahi kemampuan Tiongkok untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan kepentingan nasional strategis kontemporer.

Dualisme budaya strategis milik Tiongkok terhadap sengketa wilayah sangat sesuai dengan konsepsi budaya strategis Andrew Bloomfield yang bersifat fluid dan adaptif. Bloomfield (2012) berpendapat bahwa budaya strategis tidak statis tetapi berkembang sebagai respons terhadap nilai-nilai budaya yang bertahan lama dan pertimbangan pragmatis. Dalam kasus-kasus di atas, nampak bahwa memang benar Confucian Pacifism mewujudkan etos budaya yang mendalam yaitu harmoni, non-agresi, dan resolusi diplomatik, yang mencerminkan warisan sejarah dan filosofi negara tersebut. Pada saat yang sama, ia tidak berjalan sendirian, yang mana Cultural Realism mewakili adaptasi pragmatis terhadap tantangan geopolitik kontemporer, menekankan ketegasan dan menjaga kepentingan nasional. Interaksi yang dinamis ini memungkinkan Tiongkok untuk mengatasi sengketa teritorial yang kompleks, seperti sengketa dengan Jepang, Taiwan, dan India, dengan mengintegrasikan kesabaran diplomatik dan narasi budaya dengan kesiapan militer strategis dan tindakan tegas. Dengan demikian, kerangka kerja Bloomfield menggarisbawahi bagaimana budaya strategis dualistik Tiongkok secara efektif memadukan nilai-nilai tradisional dengan strategi adaptif untuk menjaga stabilitas dan memproyeksikan kekuatan di panggung internasional.

Penutup

Sesuai dengan argumentasi utama yang penulis miliki sebelumnya, sejarah kultural Tiongkok memiliki peranan penting dalam menyusun fondasi dari budaya strategis yang dimiliki oleh negaranya tersebut. Nilai-nilai seperti konfusianisme yang menekankan kebaikan dan kebajikan ini mendorong Tiongkok untuk melakukan interaksi yang harmonis dengan negara-negara lain. Inilah yang disebut dengan budaya strategis Confucian Pacifism.

Namun Confucian Pacifism tidak pernah berjalan sendirian, di mana Cultural Realism selalu hadir beriringan. Memastikan perdamaian terjaga dengan cara agresi dan modernisasi militer selalu menjadi cara Tiongkok untuk beroperasi. Hal ini direfleksikan dengan kebijakan luar negeri dan juga strategi militer yang diadopsi oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok dari masa ke masa yang selalu menaruh pasifisme dan perdamaian atas basis harmoni sebagai landasan utamanya yang dijalankan bersamaan dengan kemampuan Tiongkok untuk menjaga keamanan negaranya sendiri. Mengapa bisa demikian?

Budaya strategis dualistik Tiongkok, yang mencakup Confucian Pacifism dan Cultural Realism, merupakan hasil yang tak bisa dipisahkan dari tujuan utamanya untuk menjadi pusat pengaruh global, realisasi dari Zhong Guo, yang secara langsung juga melindungi kepentingan nasionalnya. Ketika Tiongkok ingin merebut kembali status historisnya sebagai Zhong Guo, "Kerajaan Tengah", Tiongkok tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan strategis saja.

Berbeda dengan pemikiran budaya strategis yang lainnya, yang terkadang mengatakan bahwasanya budaya strategis bersifat deterministik, dan juga jikalau suatu negara memiliki lebih dari satu budaya strategis yang mempengaruhi *decision making* maka salah satu budaya strategis tersebut saja yang akan mendominasi dalam satu situasi, Tiongkok telah membuktikan bahwa teori ini tidak selalu benar. Ia memiliki dua budaya strategis yang sifatnya bertolak belakang dalam bekerja, namun bisa membawakan pengaruh kepada aksi-aksi Tiongkok saat menjaga wilayahnya dengan saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Dengan ini, Tiongkok dapat tetap berdialog untuk mencapai konsensus bersama namun juga selalu siap untuk melindungi kedaulatan dan keamanan dari negaranya sendiri jikalau disuguhkan dengan *external threats*.

Confucian Pacifism, dengan penekanannya pada keharmonisan, diplomasi, dan non-agresi, sejalan dengan keinginan Tiongkok untuk mendorong kebangkitan secara damai dan memupuk hubungan internasional yang positif. Pada saat yang sama, Cultural Realism menggarisbawahi perlunya ketegasan dan kesiapan strategis untuk menjaga kedaulatan dan memproyeksikan kekuasaan. Dualisme ini terlihat jelas dalam penanganan sengketa wilayah oleh Tiongkok, yang menyeimbangkan negosiasi diplomatik dengan sikap militer yang kuat. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur yang tampaknya kontradiktif ini, Tiongkok menavigasi kompleksitas geopolitik ambisi regional dan globalnya, menjadikan koeksistensi kedua budaya strategis ini tidak hanya logis namun juga penting dan wajar bagi Tiongkok.

Daftar Pustaka

- Bloomfield, Alan. (2012). Time to move on: Reconceptualizing the strategic culture debate. *Contemporary Security Policy*, 33(3), 437-461. <https://doi.org/10.1080/13523260.2012.727679>
- Callahan, D. (2016). *China's Rise: How It Will Impact the World*. *The World Today*, 72(6).
- China Global Television Network. (2018). If Treasures Could Talk: How China's Name Originated. <https://news.cgtn.com/news/77516a4e356b7a6333566d54/index.html>
- Christensen, T. J. 2006. Fostering Stability or Creating a Monster? The Rise of China and U.S. Policy Toward East Asia. *International Security*
- Fairbank, J. K., & Goldman, M. (1998). *China: A New History*. Harvard University Press.
- Fravel, M. T. 2010. International Relations Theory and China's Rise: Assessing China's Potential for Territorial Expansion. *International Studies Review*
- Foot, R. (2016). The Ethics of Chinese Foreign Policy: Ideology, Strategy, and National Interests. *International Affairs*, 92(2), 391-411.
- Gärtner, Heike. (2008). *Strategic Culture and Small States: The Case of Finland*. Finnish Institute of International Affairs.
- Gray, Colin S. 1999. *Modern Strategy*. Oxford University Press.
- Gray, Colin S. 1999. Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back. *Review of International Studies*.
- Hsu, K. (1999). *The Chinese Empire: A Historical Encyclopedia*. Greenwood Press.

- Hofstede, Geert. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations* (2nd ed.). Sage Publications.
- Jebb, Benjamin. 2023. *China's Use of Force in Territorial Disputes: The Discontinuity Between Land and Sea*. Princeton Journal of Public and International Affairs.
- Johnston, Alastair I. 1995. *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*. Princeton University Press.
- Johnston, Alastair I. 1995. *Thinking about Strategic Culture*. International Security.
- Khrisnanputty, Pia. 2020. *Not Just India, Tibet – China has 17 territorial disputes with its 17 neighbors, on land & sea*. The Print.
- Klein, Yitzhak. 1991. *A Theory of Strategic Culture*. Comparative Strategy.
- Lantis, Jeffrey S. 2002. *Strategic Culture and National Security Policy*. International Studies Review.
- Lock, Edward. 2017. *Strategic Culture Theory: What, Why, How*. Oxford Research Encyclopedia
- Medeiros, E. S. 2005. *Strategic Reactions to Chinese Power: Diversion, Hedging, and Tailored Engagement*. The Washington Quarterly
- Nathan, Andrew J. dan Scobell, Andrew. 2012. *China's Search for Security*. Columbia University Press.
- Ratner, E. 2014. *The China Balance Sheet in 2014: Energy and Military Balance*. Center for a New American Security.
- Sato, Yoichiro. 2014. *A Review of Strategic Culture Studies: Defining and Redefining the Subject*. Journal of Strategic Studies.
- Shambaugh, David. (2005). *China: A New History*. Oxford University Press.
- Shambaugh, David. (2013). *China Goes Global: The Partial Power*. Oxford University Press.
- Shirk, S. L. 2007. *China: Fragile Superpower*. Oxford University Press.
- Snyder, J. 1977. *The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations*. RAND Corporation.
- Sutter, Robert G. 2021. *Chinese Foreign Relations: Power and Policy of an Emerging Global Force*. Rowman & Littlefield.
- Tellis, A. J. 2012. *Balancing Without Containment: An American Strategy for Managing China*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Wang, Ban. 2017. *Chinese Visions of World Order: Tianxia, Culture, and World Politics*. Duke University Press.

Weiming, Tu. 2024. Confucianism. Britannica.

Zhao, Dingxin. (2010). The historical evolution of the Chinese concept of the Middle Kingdom. *Chinese Historical Review*, 17(2).

Zheng, B. 2013. Confucianism and Chinese Foreign Policy: Does Confucianism Make a Difference? Asian Perspective.